

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, telah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri. Dalam rangka untuk mewujudkan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat luas, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam menjalankan otonomi daerah melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana konsep ini menuntut adanya pengembangan kinerja institusi baik pemerintah, bisnis dan masyarakat secara komprehensif pada semua tingkatan (Ni Luh Sri Rahayu,dkk 2014).

Menurut Indra (2006:274) Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Dengan demikian, kinerja pemerintah daerah berarti bagaimana atau sejauh mana pemerintah daerah menyelenggarakan urusan-urusan tersebut. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas.

Kinerja organisasi sektor publik dapat dilihat dari penggunaan anggaran. Anggaran yang disusun harus dengan pendekatan kinerja (Irsan,2010 dalam Ni

Luh Sri Rahayu, dkk 2014). Anggaran dengan pendekatan kinerja menekankan pada konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan anggaran kinerja disusun untuk mencoba mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik (Mardiasmo, 2002 :84)

Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang (Bastian, 2010:275).

Menurut Keith Davis (1985:77) dalam Mangkunegara (2001 :113), mengemukakan Partisipasi adalah keterlibatan emosi dan mental pegawai dalam situasi kelompok yang mengiatkan mereka untuk menyumbang pada tujuan kelompok serta bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Jadi partisipasi dalam penyusunan anggaran dapat diartikan merupakan keikutsertaan seseorang dalam menyusun dan memutuskan anggaran secara bersama. Sukses atau gagalnya para staf dalam suatu SKPD dalam melaksanakan anggaran merupakan suatu refleksi langsung tentang keberhasilan ataupun kegagalan manajerial SKPD dalam melaksanakan tugas dan tanggung yang diembannya.

Dalam proses penganggaran aparat pemerintah diberikan kesempatan untuk ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan, yaitu melalui perencanaan anggaran. Hal tersebut sangat penting berkenaan dengan adanya

peningkatan kepuasan dan pegawai akan merasa lebih produktif sehingga memungkinkan munculnya perasaan berprestasi yang mendorong peningkatan kinerja (Ni Luh Sri Rahayu, dkk 2014).

“Terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran, yaitu *top-down* (pendekatan dari atas ke bawah), *bottom-up* (pendekatan dari bawah ke atas) dan pendekatan lain yang merupakan gabungan dari kedua pendekatan tersebut, yaitu pendekatan partisipasi” (Anthony dan Govindarajan (2005:86)

Sumber daya manusia merupakan elemen organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian (Suci Derma Juita :2013). Menurut Wirawan (2015:20) Sumber Daya Manusia merupakan orang-pegawai, karyawan, buruh- yang bekerja untuk suatu organisasi, perusahaan melaksanakan aktivitasnya, lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, tentara, polisi dan sebagainya yang direkrut untuk melaksanakan aktivitas manajemen organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2001) dalam Suci Derma Juita (2013) menyebutkan bahwa kinerja suatu organisasi tergantung pada sumber daya manusia didalamnya, baik secara individu maupun sebagai tim. Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bakat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia akan mendorong kinerja pegawai pemerintah sesuai dengan

yang diharapkan. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia semakin tinggi pula kinerja pemerintah, begitu juga sebaliknya semakin rendah kualitas sumber daya manusia maka semakin rendah kinerja pemerintah. (Ni luh Sri Rahayu, dkk : 2014)

Menurut Bodnar dan Hopwood (2010:1), Sistem Informasi Akuntansi merupakan kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi. Informasi tersebut dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan. Sistem informasi akuntansi melakukan hal tersebut dengan sistem manual atau melalui sistem terkomputerisasi. Keberhasilan pelaksanaan sistem informasi akuntansi yang telah dirancang sangat dipengaruhi oleh faktor desain sistem yang mencerminkan adanya pemisahan tanggung jawab fungsional yang tepat dan sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik.

Sistem informasi yang diterapkan pada pemerintahan daerah serta semua SKPD yang dibawahnya adalah "Sistem Informasi Pengelolaan SKPD", yang merupakan sistem informasi akuntansi terkomputerisasi serta semua SKPD yang dibawahnya. Sistem akuntansi Pemerintah Daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tersedia "Sistem Informasi Pengelolaan SKPD" diharapkan dapat membantu setiap SKPD. "Sistem Informasi Pengelolaan SKPD" dibuat untuk mempermudah penerapan Peraturan Menteri

Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penerapan sistem informasi pada organisasi akan mempengaruhi kinerja pegawai dalam organisasi tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penerapan sistem informasi pada organisasi dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif terhadap kinerja pegawai dan lembaga tersebut (Yesi Umitasari :2015)

Fakta yang terjadi di lapangan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pekanbaru selama 6 tahun berturut- turut, yakni dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pekanbaru. (*bpk.go.id*)

Temuan yang paling mendasar yang ada di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pekanbaru, dianggarkan Rp12,4 miliar dengan realisasi Rp9 miliar lebih yang diperuntukan bagi halte bus,taxi dan persiapan lahan pendukung melalui rekanan PT Bintang Nusantara. Tetapi dalam penggunaannya aturan ini tidak sesuai dengan PP nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Perusahaan harusnya membayar pph sebesar 3 persen dari dasar pajak namun yang dibayarkan hanya 2,5 persen. Ini merupakan keteledoran pemerintah khususnya bendahara yang tidak cermat dalam menerapkan PPh untuk jasa Konstruksi. (*potretnews.com*)

Berikut ini adalah tabel laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja SKPD di Kota Pekanbaru yang realisasi anggarannya terendah pada tahun 2015 :

Tabel I.1
Daftar SKPD yang Realisasi Anggaran Terendah Tahun 2015
 Dalam Rupiah

No	SKPD	Jumlah Anggaran	Realisasi 2015	%
1	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	109.849.194.019,-	3.054.433.846,-	2,78
2	Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota	79.752.382.910,-	9.406.456.170,-	11,79
3	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Cipta Karya	536.333.905.393,-	65.616.836.384,-	12,23
4	Dinas Sosial dan Pemakaman	27.090.350.046,-	3.612.508.403,-	13,34
5	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	409.242.798.975,-	78.299.632.521,-	19,13

Sumber : *bpkad.pekanbaru.go.id*

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ni Luh Sri Rahayu, dkk (2014) tentang “ Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jemberana”. Hasil penelitian ini partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Suci Derma Juita (2013) juga meneliti tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan komunikasi organisasi terhadap kinerja SKPD Kota Malang. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan komunikasi organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja SKPD.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ni Luh Sri Rahayu, dkk (2014) mengenai pengaruh partisipasi

penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Jembrana. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada jumlah sample, responden serta objeknya yaitu SKPD Kota Pekanbaru. Penelitian ini membuktikan bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja SKPD baik secara simultan maupun parsial.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian pada SKPD Kota Pekanbaru dengan judul : **“Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Pekanbaru “**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Pekanbaru
2. Bagaimana pengaruh kualitas sumber daya manusia (SDM) terhadap kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Pekanbaru
3. Bagaimana pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Pekanbaru

4. Bagaimana pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD Kota Pekanbaru

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menemukan bukti empiris bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Pekanbaru
- b. Untuk menemukan bukti empiris bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Pekanbaru
- c. Untuk menemukan bukti empiris bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Pekanbaru
- d. Untuk menemukan bukti empiris bahwa partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD Kota Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti dibidang akuntansi, khususnya yang berkenaan dengan anggaran dan Kinerja Pemerintah.
2. Bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini SKPD yang terdapat pada Kota Pekanbaru, semoga hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan atau

masuk dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah untuk mencapai tujuan anggaran yang diinginkan.

3. Bagi peneliti berikutnya, diharapkan dapat dijadikan bahan informasi untuk topik yang sama pada masa yang akan datang.

D. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini dibagi menjadi 6 (enam) bab yang merupakan pembahasan tersendiri tentang topik dari bab tersebut dan secara keseluruhan mempunyai hubungan antara bab satu dengan yang lainnya, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bagian ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menjadi acuan pemahaman teoritis dalam penelitian ini, review penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran teoritis serta pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini meliputi lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, operasional variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM WILAYAH KOTA PEKANBARU

Bab ini menggambarkan mengenai sejarah singkat SKPD, Visi dan Misi, dan struktur organisasi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian sesuai dengan variabel-variabel yang telah ditentukan dalam penelitian ini.

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari bab-bab yang sebelumnya.

